

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

DIUBAH MENJADI

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. VISI

Dalam Tahun periode 2010-2015, Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara adalah “MENUJU SULAWESI UTARA YANG BERBUDAYA, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”, sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara lebih sejahtera.

Berdasarkan Visi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2015 terdapat 3 (tiga) Kalimat kunci yaitu Rakyat Sulawesi Utara yang Berbudaya, Berdaya Saing, dan Sejahtera.

Kalimat “Rakyat Sulawesi Utara yang Berbudaya” adalah terwujudnya masyarakat yang tetap memegang teguh kearifan lokal dengan prinsip Sitou Timou Tumou Tou yang tercermin dalam budaya mapalus, mapaluse, dan moposat. Masyarakat Sulawesi Utara memiliki karakter yang mampu menerima dan mengadopsi budaya modern yang konstruktif, agamais, berkeadilan serta berkepribadian/berjatidiri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan, dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi.

Kalimat “Rakyat Sulawesi Utara yang Berdaya Saing” adalah terwujudnya seluruh masyarakat yang sehat, cerdas untuk menjadi unggul di segala bidang, serta mampu berperan dalam pembangunan nasional maupun internasional.

Kalimat “Rakyat Sulawesi Utara yang Sejahtera” merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan, dan daya beli masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu dari sekian banyak tujuan pembangunan lainnya, yang pada gilirannya akan mewujudkan masyarakat Sulawesi Utara yang memiliki penghidupan yang layak, bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman, sentosa, dan makmur.

5.2. MISI

Sesuai dengan harapan terwujudnya “Rakyat Sulawesi Utara yang Berbudaya, Berdaya Saing, dan Sejahtera”, maka ditetapkan “Misi” Sulawesi Utara 2010-2015 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut.

1. Sulawesi Utara yang Berbudaya:

- a. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, keadilan, dan hak asasi manusia dan kesetaraan gender serta memantapkan landasan etik dan moral untuk mewujudkan kondisi aman, damai, nyaman, tertib, dan disiplin
- b. Mengembangkan kebudayaan dan berbagai potensi alam daerah sebagai bagian dari warisan dunia.

2. Sulawesi Utara yang Berdaya Saing:

- a. Memantapkan penerapan *Clean Government* dan *Good Governance* yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta melaksanakan pelayanan publik yang optimal.
- b. Mewujudkan masyarakat yang sehat, memiliki harapan hidup yang panjang, cerdas, berdaya saing tinggi, dan berprestasi.
- c. Memberdayakan pelaku bisnis dalam kegiatan ekonomi global, regional, dan lokal yang berbasis pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan koperasi.
- d. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab.
- e. Meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan.
- f. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Timur dan Pasifik.
- g. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sulawesi Utara dan Indonesia Timur Bagian Utara.
- h. Meningkatkan kerjasama lokal, nasional, dan internasional.
- i. Memantapkan revitalisasi pertanian, perikanan, dan fasilitas penunjang perekonomian daerah.
- j. Menyediakan infrastruktur publik yang memadai.

3. Sulawesi Utara yang Sejahtera:

- a. Mengelola sumber daya alam secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan melestarikan lingkungan hidup serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap akibat-akibat perubahan iklim.
- b. Melaksanakan penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial dengan memperhatikan kepentingan kaum perempuan, anak, dan lanjut usia.
- c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (petani, nelayan, buruh, dan pegawai).

5.3. Tujuan dan Sasaran

Secara Umum Tujuan Pembangunan Daerah ialah: “Mempersiapkan Sulawesi Utara menjadi provinsi yang maju, yang berfungsi sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Pembangunan daerah dilaksanakan dengan pelibatan secara langsung warga masyarakat dan pelaku bisnis bersama-sama dengan pemerintah dalam perencanaan dan proses pembangunan daerah, serta mengelola dan memanfaatkan sumber daya berkelanjutan menuju masyarakat yang berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera”. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Provinsi Sulawesi Utara, 2010-2015

Visi : “Menuju Sulawesi Utara yang Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera”		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi I : Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, keadilan dan hak asasi manusia dan kesetaraan gender serta memantapkan landasan etik dan moral untuk mewujudkan kondisi aman, damai, nyaman, tertib, dan disiplin	1.1 Mewujudkan ketertiban masyarakat, demokrasi dan supremasi hukum	1.1.1. Terwujudnya sinkronisasi kinerja aparat penegak hukum dan jajarannya
		1.1.2. Terselenggaranya pengkajian, pengendalian, dan evaluasi produk hukum daerah serta penyebaran peraturan perundang-undangan daerah
		1.1.3. Terlaksananya Revitalisasi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (HANKAMRATA)
	1.2 Mewujudkan penegakan hak asasi manusia	1.2.1. Terwujudnya kearifan lokal dalam menjamin penegakan HAM, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
	1.3 Mewujudkan kondisi aman, damai, nyaman, tertib, dan disiplin	1.3.1. Terwujudnya rasa saling percaya dan hubungan harmonis antar kelompok masyarakat (etnik dan budaya)
	1.4 Mewujudkan landasan etik dan moral yang mantap	1.4.1. Terlaksananya peran dan fungsi pendidikan lembaga keagamaan dalam kerukunan umat beragama
		1.4.2. Terlaksananya fungsi pranata sosial masyarakat (keluarga, kependuan, paguyuban) dan peran kelompok profesional
	1.5 Mewujudkan kesetaraan gender	1.5.1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam semua aspek pembangunan
	1.6 Mewujudkan partisipasi politik dalam demokrasi yang berkeadilan	1.6.1. Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat
		1.6.2. Terwujudnya pemuda yang berwawasan kebangsaan

Misi II : Mengembangkan kebudayaan dan berbagai potensi alam daerah sebagai bagian dari warisan dunia.	2.1. Memelihara dan mengembangkan kebudayaan daerah untuk menjadi warisan dunia.	2.1.1. Terwujudnya sanggar-sanggar budaya serta komunitas adat dan bahasa daerah
		2.1.2. Terwujudnya pelestarian peninggalan benda dan situs bersejarah (cagar budaya)
	2.2. Memelihara dan mengembangkan potensi alam daerah untuk menjadi warisan dunia	2.2.1. Terwujudnya pengelolaan kawasan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam baik kawasan hutan, taman laut dan kawasan terumbu karang Wallacea
		2.2.2. Terwujudnya Pelestarian kawasan konservasi (Taman Nasional: Bunaken, dan Bogani Nani Wartabone; Cagar Alam: Tangkoko, Dua Sudara; Suaka Margasatwa: Manembo-nembo, Karakelang; Taman Wisata Alam: Batu Putih, Batu Angus)
		2.2.3. Terwujudnya Daerah Perlindungan Kawasan dengan Potensi Energi dan sumberdaya mineral, Pertanian, Kehutanan, perkebunan dan Perairan (KKP) dan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)
		2.2.4. Terwujudnya kawasan konservasi termasuk pengembangan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) dan Taman Hutan Raya (TAHURA)
Misi III: Memantapkan penerapan <i>Clean Government</i> dan <i>Good Governance</i> yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta melaksanakan pelayanan publik yang optimal	3.1 Memantapkan pelaksanaan birokrasi pemerintah yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif dan non-diskriminatif	2.2.5. Terlaksananya program pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
		3.1.1. Terwujudnya reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara yang berkualitas
		3.1.2. Meningkatnya Hasil penilaian kriteria kelayakan penyelenggaraan Diklat sesuai standar LAN RI pada unsur tenaga kediklatan, program diklat dan fasilitas diklat

		3.1.3. Terselenggaranya pemerintahan yang transparan dan akuntabel
	3.2. Mengoptimalkan pelayanan publik	3.2.1. Terwujudnya pelayanan perijinan terpadu di seluruh kabupaten/kota
		3.2.2. Terwujudnya inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam pelayanan publik, termasuk upaya pengembangan program non budgeter
		3.2.3. Terwujudnya program dan fungsi pemerintahan di tingkat provinsi dan dengan pemerintah daerah kabupaten/ kota
	3.3 Mewujudkan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta ketaatan aparatur pemerintah daerah	3.3.1. Terselenggaranya pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik
		3.3.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah
		3.3.3. Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
		3.3.4. Terlaksananya keberlanjutan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan daerah provinsi, kabupaten/ kota
		3.3.5. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi yang transparan dan akuntabel
		3.3.6. Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang optimal dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama APBD

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA 2010-2015**

	3.4. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran	3.4.1. Terfasilitasi-nya Pelaksanaan Tugas Lembaga DPRD dalam penyusunan Produk DPRD
	3.5. Memantapkan kinerja aparatur sipil negara di daerah yang berkompetensi, berkualitas, berwibawa, jujur dan profesional	3.5.1. Terwujudnya aparatur sebagai anggota Korpri yang bebas KKN dan disiplin
		3.5.2. Terbinanya PNS dalam rangka meningkatkan kekuatan lembaga Korpri sebagai wadah aparatur birokrasi di daerah Provinsi Sulawesi Utara
		3.5.3. Terciptanya aparatur birokrasi yang berdaya saing dan sejahtera
Misi IV : Mewujudkan masyarakat yang sehat, memiliki harapan hidup yang panjang, cerdas, berdaya saing tinggi, dan berprestasi	4.1 Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	4.1.1. Terwujudnya wajib belajar pendidikan dasar dan menengah 12 tahun
		4.1.2. Terlaksananya percepatan penuntasan buta aksara
		4.1.3. Terlaksananya pembangunan dan pengembangan sarana dan mutu pendidikan non formal
		4.1.4. Terwujudnya peningkatan fasilitas dan mutu pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar sembilan tahun, pendidikan informal, pendidikan menengah, pendidikan luar biasa
		4.1.5. Terwujudnya pendidikan budi pekerti sejak dini
		4.1.6. Terlaksananya manajemen berbasis sekolah
		4.1.7. Terlaksananya kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
		4.1.8. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan yang merata, bermutu dan berkeadilan

		4.1.9. Terwujudnya kesejahteraan bagi tenaga medis di wilayah terpencil, pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan
	4.2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang berdaya saing tinggi	4.2.1. Terlaksananya pemberian beasiswa kepada anak-anak bertalenta dan berprestasi
		4.2.2. Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas di daerah terpencil dan kawasan perbatasan
		4.2.3. Terlaksananya peningkatan jumlah dan mutu fasilitas perpustakaan dan kearsipan
		4.2.4. Terwujudnya Sulawesi Utara sebagai hub pendidikan kelautan dan geothermal di Indonesia Timur
		4.2.5. Terlaksananya peningkatan mutu pendidikan kesehatan, kejuruan, dan politeknik
		4.2.6. Terlaksananya standar infrastruktur sekolah-sekolah menurut Standar Nasional dan SPM
		4.2.7. Terlaksananya Peningkatan kemampuan berbahasa Inggris dan asing lainnya sejak SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
		4.2.8. Terwujudnya kelembagaan sekolah yang berstandar nasional dan internasional
		4.2.9. Terlaksananya peran swasta dalam penyelenggaraan pendidikan
		4.2.10. Terwujudnya prestasi dalam kejuaraan olahraga nasional maupun internasional serta kesejahteraan atlet-atlet daerah

		4.2.11. Terwujudnya Sulawesi Utara sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan olahraga nasional melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas olahraga serta mempersiapkan Sulawesi Utara sebagai tuan rumah penyelenggaraan turnamen olahraga nasional
		4.2.12. Terwujudnya pemuda yang berwawasan kebangsaan
		4.2.13. Terwujudnya pengembangan teknologi informasi kesehatan
		4.2.14. Terwujudnya kesejahteraan bagi tenaga medis di wilayah terpencil, pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan
		4.2.15. Terwujudnya peningkatan mutu fasilitas kesehatan (formal dan informal)
		4.2.16. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan
	4.3 Mewujudkan masyarakat yang sehat sesuai dengan tujuan MDGs dan SPM	4.3.1. Terwujudnya wajib belajar pendidikan dasar dan menengah 12 tahun
		4.3.2. Terwujudnya penurunan angka kesakitan dan angka kematian masyarakat
Misi V : Memberdayakan pelaku bisnis dalam kegiatan ekonomi global, regional, dan lokal yang berbasiskan pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi.	5.1. Memantapkan peran pelaku bisnis dalam perekonomian	5.1.1. Terwujudnya <i>database</i> perekonomian dan pusat informasi bisnis, termasuk <i>database</i> usaha mikro
	5.2. Meningkatkan ekonomi masyarakat	5.2.1. Terlaksananya deregulasi Peraturan Daerah (PERDA) yang menghambat investasi dan menetapkan PERDA yang mendorong akselerasi perekonomian daerah

		5.2.2.	Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan-kawasan pendukung KEK
		5.2.3.	Peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan swasta (<i>Public Private Partnership</i>)
		5.2.4.	Terwujudnya wiraswasta perempuan dan pemuda lokal (<i>local women and young entrepreneur</i>)
		5.2.5.	Terwujudnya ekonomi kreatif lokal
	5.3. Mengembangkan usaha mikro terutama untuk membuka lapangan kerja dan ketahanan ekonomi keluarga	5.3.1.	Terlaksananya aksesibilitas permodalan, pemasaran, dan teknologi
		5.3.2.	Terwujudnya peningkatan dan pengembangan ekspor yang diikuti daya saing produk industri kecil, usaha mikro/menengah
		5.3.3.	Terakselerasinya peningkatan mutu produk UMKM melalui penguasaan teknologi
		5.3.4.	Terwujudnya kemitraan dalam bentuk inti-plasma, subkontrak, waralaba (<i>franchise</i>), distribusi dan keagenan, perdagangan umum, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya, seperti usaha patungan (<i>joint venture</i>), bagi hasil, dan penyumberluaran (<i>outsourcing</i>)
	5.4. Memantapkan dan mengoptimalkan fungsi kelembagaan koperasi	5.4.1.	Terlaksananya fungsi kelembagaan Koperasi
		5.4.2.	Terwujudnya peningkatan jumlah koperasi aktif, UMKM dan wirausaha baru

Misi VI : Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab	6.1. Menerapkan penguasaan teknologi informasi dalam pelaksanaan <i>E-government</i>	6.1.1. Terlaksananya <i>e-Government</i>
		6.1.2. Terlaksananya sistem informasi <i>online</i>
	6.2. Mewujudkan kebebasan pers yang bertanggung jawab	6.2.1. Terwujudnya fasilitas media massa
	6.3. Memperluas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat	6.3.1. Meningkatnya proporsi masyarakat pengguna Teknologi, Informasi dan Komunikasi
		6.3.2. Terwujudnya sarana pusat informasi provinsi dan kabupaten/kota
Misi VII : Meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan	7.1. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan kawasan perbatasan	7.1.1. Terlaksananya pengamanan dan keamanan di kawasan perbatasan dan pintu-pintu masuk dari segala macam bentuk kejahatan
	7.2. Memantapkan aksesibilitas infrastruktur dasar kawasan perbatasan	7.2.1. Terselenggaranya Lalu lintas perdagangan antar pulau dan kawasan perbatasan kelancaran perdagangan lintas batas wilayah kepulauan
		7.2.2. Terwujudnya pembangunan fasilitas infrastruktur dasar termasuk jaminan kelancaran jalur transportasi lintas batas baik udara maupun laut
Misi VIII : Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Timur dan Pasifik	8.1. Meningkatkan infrastruktur transportasi berskala internasional	8.1.1. Terwujudnya Peningkatan navigasi pelabuhan Samudera Bitung
		8.1.2. Terlaksananya kerjasama dan sosialisasi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang kepada propinsi-propinsi tetangga, pelaku bisnis (eksportir dan importir), perusahaan pelayaran Internasional- <i>Main line Operator (MLO)</i> -dan nasional
	8.2. Mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung	8.2.1. Terwujudnya lokasi pengembangan KEK di Bitung

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA 2010-2015**

	8.3. Meningkatkan peran sektor swasta	8.3.1. Terwujudnya peran sektor swasta serta asosiasi-asosiasi bisnis untuk lebih aktif terlibat dalam bisnis nasional dan internasional
		8.3.2. Terwujudnya peningkatan investasi di daerah
		8.3.3. Terwujudnya jaringan pelayaran dan penerbangan internasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah
Misi IX : Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sulawesi Utara dan Indonesia Timur Bagian Utara	9.1. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata	9.1.1. Terlaksananya pembenahan sarana dan prasarana pariwisata
	9.2. Peningkatan pelayanan industri pariwisata	9.2.1. Terciptanya kualitas pelayanan industri pariwisata
	9.3. Menciptakan <i>branding</i> tentang Sulawesi Utara	9.3.1. Terlaksananya peran dan fungsi badan promosi pariwisata
		9.3.2. Tetap terjaganya tata nilai sosial budaya
Misi X : Meningkatkan kerjasama lokal, nasional, dan internasional	10.1. Meningkatkan kerjasama internasional	10.1.1. Terlaksananya kerjasama sub-regional <i>Brunei Indonesia Malaysia Philippines-East Asean Growth Area (BIMP-EAGA)</i>
		10.1.2. Terwujudnya Kerjasama Internasional yang berdampak bagi pembangunan daerah
	10.2. Memantapkan kerjasama sub-regional	10.2.1. Terlaksananya kerjasama antar daerah: antar kabupaten/kota dan propinsi, Badan Kerjasama Propinsi-propinsi Kepulauan, Kawasan Timur Indonesia (KTI), Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS), dan kerjasama pengelolaan Teluk Tomini

Misi XI : Memantapkan revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan fasilitas penunjang perekonomian daerah	11.1. Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan termasuk peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan	11.1.1. Terwujudnya swasembada berkelanjutan produk pertanian dan peternakan
		11.1.2. Terwujudnya peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha penangkapan dan pembudidaya serta daya saing produk perikanan
		11.1.3. Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
	11.2. Meningkatkan diversifikasi konsumsi pangan (food security) dan cadangan pangan masyarakat	11.2.1. Terwujudnya diversifikasi konsumsi pangan, keamanan pangan (<i>food security</i>), dan cadangan pangan di masyarakat
	11.3. Meningkatkan kesejahteraan petani, pekebun, nelayan serta penyuluh	11.3.1. Terwujudnya kesejahteraan petani, nelayan dan pekebun
		11.3.2. Terwujudnya peningkatan kompetensi, mutu dan kesejahteraan penyuluh
	11.4. Meningkatkan hasil-hasil riset bidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan	11.4.1. Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
Misi XII : Menyediakan infrastruktur publik yang memadai	12.1. Menyediakan Perda RTRW Provinsi	12.1.1. Tersusunnya Perda RTRW Provinsi
	12.2. Meningkatkan sarana prasarana transportasi yang memadai	12.2.1. Terwujudnya jalan-jalan dan jembatan yang menghubungkan wilayah perkotaan dan pedesaan
	12.3. Meningkatkan panjang jaringan jalan dan irigasi ke sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan kondisi mantap	12.3.1. Terwujudnya akses jalan dan irigasi ke sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan
		12.3.2. Terwujudnya jalan-jalan dan jembatan yang menghubungkan wilayah perkotaan dan pedesaan
	12.4. Meningkatkan Jaringan Irigasi dan luasan daerah irigasi yang terairi air irigasi	12.4.1. Terwujudnya akses jalan dan irigasi ke sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan

	12.5. Menyediakan fasilitas dan ketersediaan air minum/ air bersih yang memadai	12.5.1. Terwujudnya fasilitas pelayanan air bersih dan air baku
	12.6. Meningkatnya pelayanan angkutan udara melalui pembangunan air strip dan bandara di Kabupaten/kota	12.6.1. Terlaksananya pembangunan <i>air-strip</i> dan bandara di kabupaten/ kota oleh pihak swasta
	12.7. Meningkatnya kualitas permukiman dan perumahan melalui sarana sanitasi, limbah, persampahan dan drainase	12.7.1. Terwujudnya penyediaan dan pengelolaan air bersih, sanitasi, air limbah, persampahan dan drainase
		12.7.2. Tertatanya fasilitas kebersihan dan sanitasi
	12.8. Meningkatnya kualitas permukiman dan perumahan	12.8.1. Tersedianya perumahan yang layak huni dan terjangkau harganya dengan ketersediaan sanitasi dan air bersih
		12.8.2. Terlaksananya peningkatan fasilitas hiburan dan rekreasi umum
Misi XIII : Mengelola sumber daya alam secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan melestarikan lingkungan hidup serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap akibat-akibat perubahan iklim	13.1. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan	13.1.1. Terlaksananya peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya Alam
		13.1.2. Terwujudnya peningkatan eksplorasi pendahuluan sumberdaya mineral, air tanah dan monitoring kegunung apian
		13.1.3. Terciptanya perlindungan sumber daya hutan sebagai penyangga ekonomi dan kehidupan
		13.1.4. Terlaksananya pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
		13.1.5. Terlaksananya program mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana

	13.2. Optimalisasi pengendalian dan pemanfaatan energi panas bumi dan sumberdaya mineral	13.2.1. Terlaksananya pemanfaatan sumber daya mineral dan energi panas bumi
		13.2.2. Terjaminnya ketersediaan energi minyak dan gas bumi bagi masyarakat
		13.2.3. Terwujudnya SDM bidang ESDM yang berkualitas dan profesional
	13.3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana secara intensif	13.3.1. Tersedianya informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholders</i> tentang kawasan lingkungan geologi sebagai dasar pemanfaatan sumber daya energi dan mineral
		13.3.2. Terlaksananya program mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana
		13.3.3. Terciptanya regulasi (PERDA) yang berhubungan dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana
		13.3.4. Terlaksananya peningkatan peran aktif secara global dalam upaya penanganan dampak perubahan iklim dan bencana
		13.3.5. Terlaksananya sosialisasi dan kampanye penanganan dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana kepada masyarakat
		13.3.6. Terwujudnya sumber-sumber air bersih yang baru, serta pemeliharaan sumber-sumber air bersih yang telah ada
Misi XIV : Melaksanakan penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial dengan memperhatikan kepentingan kaum perempuan, anak dan lanjut usia	14.1. Meningkatkan fungsi dan peran lembaga-lembaga sosial	14.1.1. Terlaksananya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial
	14.2. Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan serta lansia	14.2.1. Terciptanya kompetensi dan peran perempuan di segala arah

	14.3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	14.3.1. Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak anak
		14.3.2. Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan
Misi XV : Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (petani, nelayan, buruh dan pegawai)	15.1. Mewujudkan jaminan terhadap hak-hak buruh dan pekerja	15.1.1. Penjaminan hak-hak pegawai, buruh dan pekerja
	15.2. Mewujudkan penguasaan teknologi dan kelayakan UMR	15.2.1. Terwujudnya penguasaan teknologi bagi para pekerja
		15.2.2. Terlaksananya UMR provinsi sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian